

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Mohamed Morsi merupakan presiden Mesir pertama yang terpilih secara demokratis. Dalam prosesnya memperoleh kursi kepresidenan, Morsi menjajaki karir politik pasca kepulangannya dari Amerika Serikat. Pada tahun 2000, Morsi terpilih menjadi anggota Majelis Rakyat (*People's Assembly*) secara independen karena Muslim Brotherhood merupakan organisasi terlarang untuk melakukan pencalonan di Mesir. Dalam masa tersebut, Morsi menekankan pemerintah untuk melakukan reformasi politik, melakukan langkah-langkah represif, misalnya terkait dengan hukum darurat dimana polisi memperoleh kekuatan tak terbatas dalam mencegah dan menangkap, serta hukum terkait pembatasan formasi partai politik dan mendesak pemerintah untuk memperketat aturan terkait hiburan-hiburan yang dianggapnya tak sesuai (Britannica, 2019).

Pada tahun 2005, Morsi kehilangan kekuasaannya di Majelis Rakyat setelah oposisi yang merupakan anggota administratif Presiden Hosni Mubarak menyatakan adanya kecurangan perolehan suara oleh Muslim Brotherhood pada tahun 2000. Pasca masa tersebut, Morsi ditunjuk menjadi Guidance Bureau Muslim Brotherhood yang merupakan badan tertinggi dari organisasi tersebut. Pada tahun 2006 dan 2011, Morsi ditangkap dan dipenjara terkait keterlibatan kegiatan protes yang menuntut pembentukan peradilan independen di Mesir serta protes yang menuntut Presiden Mubarak turun dari kursi kepresidenan Mesir (Britannica, 2019).

Pada 2011, Hosni Mubarak yang merupakan presiden keempat Mesir turun dari jabatannya terkait tuduhan pemerintahan korup dan penyalahgunaan kekuasaan, juga terkait dengan tuduhan pembunuhan demonstran (New York Times, 2013). Hal ini yang melancarkan jalan Muslim Brotherhood untuk terlibat secara terbuka dalam politik Mesir dan menghasilkan pembentukan *Freedom and Justice Party* (Britannica, 2019). Pada April 2012, Morsi terpilih menjadi kandidat presiden setelah pimpinan Deputy Pergerakan Umum Khairat al-Shater gagal dalam pencalonannya. Dalam masa kampanyenya, Morsi mempresentasikan dirinya sebagai kubu yang melawan sisa-sisa pendukung Mubarak (BBC, 2019).

Calon presiden yang diusung Muslim Brotherhood melalui partai *Freedom and Justice* dinyatakan menang pemilihan presiden sebesar 51,73%, 13.230.131 suara melawan mantan PM Ahmed Shafiq yang memperoleh 48,27%, 12.347.380 suara (BBC, 2012). Pasca kemenangan tersebut, Morsi dinyatakan segera keluar dari pimpinan partai *Freedom and Justice* (FJP) sesuai yang dijanjikan sebelumnya (Fathi, 2012).

Terpilihnya Morsi secara demokratis mendukung salah satu landasan politik luar negeri AS menurut Kagan dan Kristol pada bukunya *Foreign Affairs* (1996) yaitu promosi demokrasi. Terlebih tentunya hal ini berkaitan promosi demokrasi sebagai kepentingan nasional AS tanpa memandang rezim yang berkuasa di AS terhadap para rezim internasional yang dipandang memiliki potensi mengancam dunia (Rosyidin, 2011). Jika menelisik sebelum Obama berkuasa, George W. Bush juga pernah membuat kebijakan *Freedom Agenda*, yaitu upaya demokratisasi negara Timur Tengah pasca peristiwa 9/11. Pada poin-poin

Freedom Agenda dinyatakan, *“The United States will continue to press nations like Saudi Arabia and Egypt to open up their political system; encourage greater religious tolerance, and give a greater voice to their people.”* (The White House).

Bush juga menyatakan akan mendukung prinsip-prinsip demokratis di seluruh dunia termasuk dunia Islam. Perluasan demokrasi di Irak dan seluruh dunia dipandang sebagai alat untuk mengakhiri tirani dan upaya perlawanan terhadap terorisme, sebagai sarana promosi alat stabilitas di negara bermasalah, dan sebagai mekanisme untuk meningkatkan kesejahteraan di negara miskin (Congressional Research Service, 2019).

Dalam hubungannya dengan Mesir, upaya Amerika Serikat untuk mendukung proses demokratisasi juga dibuktikan dengan berbagai hal. Misalnya upaya USAID yang mendanai berbagai pelatihan pemerintah lokal dalam mengembangkan sektor-sektor demokratis misalnya upaya desentralisasi dalam Egypt Decentralization Initiative (EDI), dan pengaruh dalam pembentukan pasar bebas dan liberalisasi sosial melalui amandemen konstitusi Mesir pada 2007 (Badawi, 2021).

Munculnya gelombang Kebangkitan Arab, pemerintahan Presiden Barack Obama memiliki pandangan dalam menyikapinya yang dianggap pragmatis. Dalam hal ini AS secara mayoritas dalam berbagai hal mendukung transisi demokratis Mesir, Tunisia maupun Libya (Alessandri, Hassan, & Reinert, 2015).

Sikap AS mendukung transisi demokratis Mesir (Presiden Morsi) nantinya juga berefek pada upaya kerja samanya yang dikatakan pemerintah AS dengan pemerintahan Islam (konteks Muslim Brotherhood) dengan penilaiannya melalui

aksi/tindakan, bukan kata-kata (Sharp, Egypt: Background and U.S. Relations, 2014).

AS memandang positif gelombang Arab Spring yang membawa harapan demokratisasi negara-negara wilayah Arab Spring.

*“When the 2011 “Arab Spring” gave hope for a new wave of democracy across the region, but also threatened U.S. security and economic interests, the Obama Administration and Congress provided democracy assistance where democratization seemed most promising and continued relations with authoritarian regimes that seemed stable, even though human rights was still an issue with some countries.”* (Congressional Research Service, 2019)

USAID juga meningkatkan upayanya memperluas demokrasi di 2012 dan merilis kerangka baru terkait Strategy on Democracy, Human Rights and Governance pada tahun 2013 (Congressional Research Service, 2019).

Pada saat upaya kudeta dilakukan di Mesir, Obama menyatakan agar militer Mesir untuk mengembalikan kekuasaan kembali kepada pemerintahan yang dipilih secara demokratis dengan segera mungkin melalui proses yang transparan inklusif untuk menghindari penangkapan terhadap Morsi dan pendukungnya (Roberts, 2013). Namun dalam pernyataan lain dalam menanggapi demonstrasi di Mesir, Obama menyatakan bahwa meskipun Presiden Morsi terpilih secara demokratis, masih banyak pekerjaan yang dilakukan untuk menciptakan kehidupan demokrasi di Mesir (Roberts, 2013). Dalam sebuah pernyataan, White House tidak menggunakan istilah kudeta dan lebih memilih istilah ‘konsekuensi yang signifikan’ (BBC, 2013). Hal ini menunjukkan inkonsistensi sikap AS, sebagaimana Morsi terpilih secara demokratis sesuai dengan nilai yang dijunjung AS, tak ada tindakan yang dilakukan AS terkait kudeta Morsi. Dalam hal lain, penghindaran penggunaan istilah ‘kudeta’ oleh AS juga menjadi perhatian, karena

sesuai konteks kudeta yaitu terkait penggunaan militer dalam aksi, turunnya Morsi oleh militer merupakan bentuk yang sesuai.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Penulis mengajukan pertanyaan: Mengapa Amerika Serikat inkonsisten dalam dukungannya terhadap Presiden Morsi?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Melalui rumusan masalah yang diajukan penulis, penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

### **1.3.1. Tujuan Umum**

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana dan apa faktor sebuah negara dapat bersikap inkonsisten terhadap negara lain.

### **1.3.2. Tujuan Khusus**

Secara khusus tujuan penelitian ini adalah:

- a. Memperoleh alasan utama mengapa Amerika Serikat inkonsisten dalam dukungannya terhadap Presiden Morsi
- b. Menggambarkan bagaimana Amerika Serikat mengganti prioritas kepentingan di Mesir khususnya pada kudeta Presiden Morsi yang berujung pada inkonsistensi

## **1.4. Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1. Kegunaan Akademik**

Penelitian ini memiliki manfaat akademis utamanya untuk memperkaya literasi dalam ilmu Hubungan Internasional, khususnya berkaitan dengan analisis

pengaruh kepentingan nasional dibalik kebijakan suatu aktor negara yang dapat menyebabkan inkonsistensi terhadap negara lain.

#### 1.4.2. Kegunaan Praktis

Dalam hal ini juga penelitian ini memiliki manfaat praktis yaitu digunakan untuk pemecahan masalah, pencerahan, maupun sebagai bahan dalam pengambilan keputusan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan inkonsistensi sikap suatu negara terhadap sebuah isu atau negara lain.

### 1.5. Kerangka Pemikiran

Terdapat penelitian serupa sebelumnya misalnya oleh Thomas McDonnell berjudul *The Egyptian Coup, the United States, and a Call to Strengthen the Rule of Law and Diplomacy Rather Than Military Counter-Terrorism* tahun 2016. Dalam penelitian tersebut tidak secara mendalam dijelaskan sisi politik internasional, motif, maupun kaitan Morsi-Muslim Brotherhood dengan kepentingan nasional Amerika Serikat, namun secara umum terkait historis, teori dan perspektif hukum. Perbedaan dengan penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah pada pisau analisis yang digunakan yaitu realisme sebagai landasan berpikir, bukan melalui perspektif hukum.

Karya lain sebelumnya juga ada oleh Mervat Hatem berjudul *The Debate on the July 2013 Military Coup in Egypt: It Is About Much More than the Definition of a Coup*, dalam penelitian tersebut mempertanyakan respon dunia internasional khususnya negara Eropa dan Amerika Serikat dalam menanggapi terjadi kudeta di Mesir menghasilkan jawaban dari berbagai perspektif terkait kudeta yang terjadi

di Mesir dan bagaimana dunia internasional memandang dan merespon kudeta Mesir dalam hal upaya demokratisasi. Namun pembahasan penelitian tersebut kurang mendalam terkait pengaruh Muslim Brotherhood-Morsi dalam mempengaruhi kepentingan nasional Amerika Serikat dan cenderung membiarkan narasi internasional menjadi faktor utama sebagaimana penggunaan perspektif liberalisme dalam pisau analisisnya, berbeda dengan penelitian yang penulis angkat yaitu menggunakan perspektif realisme, khususnya kepentingan nasional dan pilihan rasional sebagai dasar pemikiran.

Penelitian lain yaitu *Obama's wavering: US foreign policy on the Egyptian crisis, 2011–13* oleh Sergio Fabbrini, menganalisis keraguan kebijakan luar negeri AS yang lebih berdasarkan perspektif konstruktivisme terhadap krisis Mesir rentang tahun 2011 sampai 2013 di bawah Obama yang lebih disebabkan oleh faktor aktor-politik domestik yang mempengaruhi kebijakan oleh Obama. Perbedaan utama penelitian ini dengan penelitian yang dijabarkan diatas yaitu pada penggunaan pisau analisis yaitu penggunaan realisme sebagai pisau untuk menganalisis faktor dibalik inkonsistensi dari Amerika Serikat terhadap Morsi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan dari perspektif realisme yang menekankan pada kepentingan nasional dan *power* yang berbeda dari penelitian yang telah disebutkan. Dalam hal ini misalnya terkait mengapa Amerika Serikat inkonsisten terhadap Presiden Morsi dan berargumen pada terdapat kepentingan dibalik keinkonsistenan Amerika Serikat. Sehubungan dengan permasalahan ini, maka penelitian yang penulis angkat akan menggunakan

beberapa teori dan konsep untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan yaitu:

#### 1.5.1. Realisme

Dalam Hubungan Internasional, realisme merupakan salah satu teori dalam perspektif klasik. Realisme sendiri didefinisikan sebagai spektrum ide yang mendasarkan pada empat ide utama yaitu terkait pengelompokan politik, egoisme/individualistik, keadaan anarki internasional, dan politik kekuatan (Goodin, 2010). Dalam perkembangan perspektif realis, terdapat beberapa tokoh penting misalnya Hans J. Morgenthau, E.H. Carr, Nicholas Spykman dan Harold J. Mackinder. Misalnya Nicholas Spykman mengutarakan pemikirannya yang sangat realis pada bukunya yang berjudul *America's Strategy In World Politics* (1942), mengajukan saran dua hal yaitu yang pertama bahwa Amerika Serikat harus mengadopsi kebijakan yang disebut *realpolitik* dengan mengakui *power* merupakan kekuatan utama dalam mengelola/memerintah di dalam hubungan internasional. Hal kedua adalah Amerika Serikat harus mengakui perimbangan kekuatan Eroasia secara langsung yang berdampak pada keamanan Amerika. Spykman juga berpandangan bahwa perjuangan akan kekuasaan (*the struggle for power*) diidentifikasi sebagai perjuangan akan bertahan (*survival*) dan perbaikan posisi akan kekuatan relatifnya merupakan suatu tujuan primer dari kebijakan internal dan eksternal suatu negara (Susilo, 2016).

Perspektif realisme mempunyai tiga asumsi dasar dalam memandang dirinya di sistem internasional (Legro & Moravcsik, 1999), yang pertama adalah realis berpandangan bahwa aktor adalah tunggal dan rasional di sistem

internasional yang anarki. Rasional tersebut bermakna bahwa sifat aktor adalah egois/mementingkan diri sendiri (Snidal, 2002). Hal tersebut diadopsi dari teori *rational choice* kepunyaan ilmu ekonomi bagaimana realisme mempercayai negara sebagai aktor akan bertindak sebagaimana perhitungan atas untung dan rugi (Rosyidin, 2022). Hal ini nantinya akan mempengaruhi *outcome* berupa kebijakan atau keputusan politik dari aktor negara. Sistem politik internasional juga merupakan arena aktor-aktor untuk mengusahakan akan kekuasaan dalam rangka pengoptimalan kepentingan nasionalnya (Baylis & Smith, 2001). Selanjutnya anarki adalah keadaan dimana tidak ada otoritas di atas negara. Misalnya Kenneth Waltz memisahkan antara sistem politik domestik dan internasional menyatakan bahwa struktur politik domestik ialah memiliki institusi pemerintahan sebagai bagian yang konkret, namun politik internasional secara kontras tidak memiliki pemerintahan (Rosyidin, 2022). Asumsi berikutnya adalah realis memandang hubungan internasional adalah konfliktual. Hal tersebut sebagaimana adopsi dari ilmu ekonomi yang berasumsi bahwa aktor saling berkompetisi untuk memperebutkan sumber daya yang terbatas (Rosyidin, 2022). Hal ini merupakan bentuk konsekuensi dari keadaan internasional yang anarki sebagaimana tidak adanya pengetahuan maksud dan tujuan negara lain, maka ada rasa saling curiga/tidak saling percaya antar aktor didalamnya. Mearsheimer menyatakan bahwa semua negara adalah potensi ancaman dan satu-satunya solusi untuk keluar dari itu adalah dengan bertumpu pada peningkatan kekuatan sendiri (Rosyidin, 2022). Situasi ini menyebabkan negara harus berprinsip *self-help* yaitu masing-masing negara bertanggungjawab atas keberlangsungan dirinya sendiri di

keadaan anarki (Baylis & Smith, 2001). Asumsi ketiga adalah pandangan realis bahwa sistem internasional ditentukan oleh kapabilitas material. Hal ini dinyatakan oleh Mearsheimer bahwa perilaku negara dibentuk sepenuhnya oleh struktur material dalam sistem internasional (Rosyidin, 2022). Maksud dari struktur material ini adalah berbagai keadaan dan sesuatu yang dapat dilihat dan dapat dihitung atau disebut sebagai *tangible power* misalnya adalah kekuatan militer, pendapatan perkapita, jumlah anggaran pertahanan, jumlah senjata nuklir, luas wilayah, posisi geografis, dan sebagainya (Rosyidin, 2022). Lalu demikian berbagai sesuatu yang tak dapat dihitung (non material) seperti budaya, norma dan nilai, dan ideologi adalah sesuatu yang tak begitu penting. Josep Frankel menyatakan bahwa sumber daya material membentuk realitas fundamental yang mempengaruhi sifat dan tindakan negara tanpa memandang apa yang negara cari, percayai, maupun bentuk (Rosyidin, 2022). Hal ini berkaitan pada negara yang harus berprinsip dan bertindak bertahan (*survival*) berkaitan dengan pandangan bahwa negara dalam pemenuhan kekuasaannya memiliki kecenderungan akan keinginan untuk menguasai negara lain (Baylis & Smith, 2001). Asumsi-asumsi dasar dari realisme yang dijelaskan sebelumnya dapat secara umum dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 1.1 Asumsi Dasar Realisme

<b>Isu</b>	<b>Pandangan</b>	<b>Terminologi</b>
Sifat dasar manusia	Egois, individualistik	<i>The selfish-individualistic assumption</i>
Aktor penting	Negara	<i>The state-centric assumption</i>
Tindakan negara	Ibarat manusia mementingkan diri sendiri	<i>The states self-interested manner assumption</i>
Pertimbangan tindakan negara	Rasional demi kepentingan nasional	<i>The unitary rational-actor assumption</i>
Karakteristik sistem internasional	Anarkis – negara berinteraksi dalam konteks anarki	<i>the anarchy assumption</i>

Sumber: I Basis Susilo (2016), Teori Hubungan Internasional: Perspektif-perspektif Klasik. Surabaya: 35-51

Asumsi dasar tersebut menjadi asumsi yang penting pada perspektif realisme dalam memandang dirinya pada hubungan internasional dan menjadi dasar untuk menganalisis suatu masalah khususnya dalam penelitian ini. Berangkat dari perspektif realisme beserta asumsi-asumsi dasar pemikirannya, selanjutnya penulis akan menggunakan konsep dari realisme yaitu kepentingan nasional. Kepentingan nasional berkaitan secara erat dengan realisme utamanya pada asumsi dasar realisme yaitu sifat egoistik/individualistik, rasional, dan kepentingan diri sendiri.

### 1.5.2. Kepentingan Nasional

Seperti pada penjelasan realisme memandang dirinya dalam struktur internasional, kepentingan nasional menjadi bagian penting dari realisme dalam hubungan internasional. Scott Burchill pada *The National Interest in International*

*Relations Theory* (2005) melalui perspektif realisme menyatakan bahwa negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya haruslah memiliki tujuan/misi untuk memperoleh kepentingan nasional negaranya. Kepentingan nasional harus dilihat dari kepentingan negara sebagaimana negara adalah supremasi politik tertinggi di masyarakat dan keadaan anarki dari politik internasional hanya dapat bisa ditanggulangi lewat negara (Burchill, 2005). Oleh karena negara merupakan aktor tunggal dan utama, kepentingan nasional tidak lain merupakan kepentingan negara yang didasarkan pada *power*/kekuasaan yang dimiliki negara. Dalam pengambilan keputusan juga dipengaruhi oleh kondisi bahwa negara adalah aktor rasional, maka pertimbangan pengambilan keputusan adalah berdasar pada tujuan dan kepentingan nasional (Viotti & Kauppi, 1999). Hal ini difokuskan sebagaimana dinyatakan Morgenthau yang secara umum mengasumsikan pandangannya pada sifat alamiah manusia seperti kepentingan diri sendiri, *power*, dan individualistik (Susilo, 2016).

Hans J. Morgenthau menyatakan secara lugas yang menyatakan tak ada kebijakan luar negeri suatu negara yang berhasil jika didasarkan pada pertimbangan moral, yang justru tak hanya gagal namun hanya dapat berhasil jika terjadi suatu sebab/kecelakaan. Tidak ada kebijakan luar negeri yang dinyatakan sukses tanpa mendasarkan pada kepentingan nasional. Lebih lanjut Morgenthau menekankan pada dua hal terkait negara atas kepentingan nasionalnya. Morgenthau menyatakan "*the choice of ends and means of foreign policy is of necessity predetermined in a dual way: by the objectives to be promoted and by the power available for the pursuit of these object.*" (Susilo, 2016). Terkait

dengan keberhasilan suatu kebijakan luar negeri, objek suatu kepentingan nasional disebutkan haruslah sepadan yang tak didasarkan pada satu pandangan kepentingan dari objek itu, namun didasarkan pula dengan pertimbangan ketersediaan sumber daya dan kekuatan.

Melalui berbagai asumsi dasar dari realisme dan bagaimana kepentingan nasional menjadi penting dalam menganalisis rumusan masalah pada penelitian ini, penulis selanjutnya menggunakan teori aktor rasional. *Rational Choice* digunakan dalam menganalisis bagaimana negara bertindak sesuai dengan asumsi realisme yaitu rasional demi kepentingan nasionalnya, maka negara akan menjadi rasional jika kepentingan nasionalnya dihadapkan pada pilihan satu atau dua.

### 1.5.3. *Rational Choice*

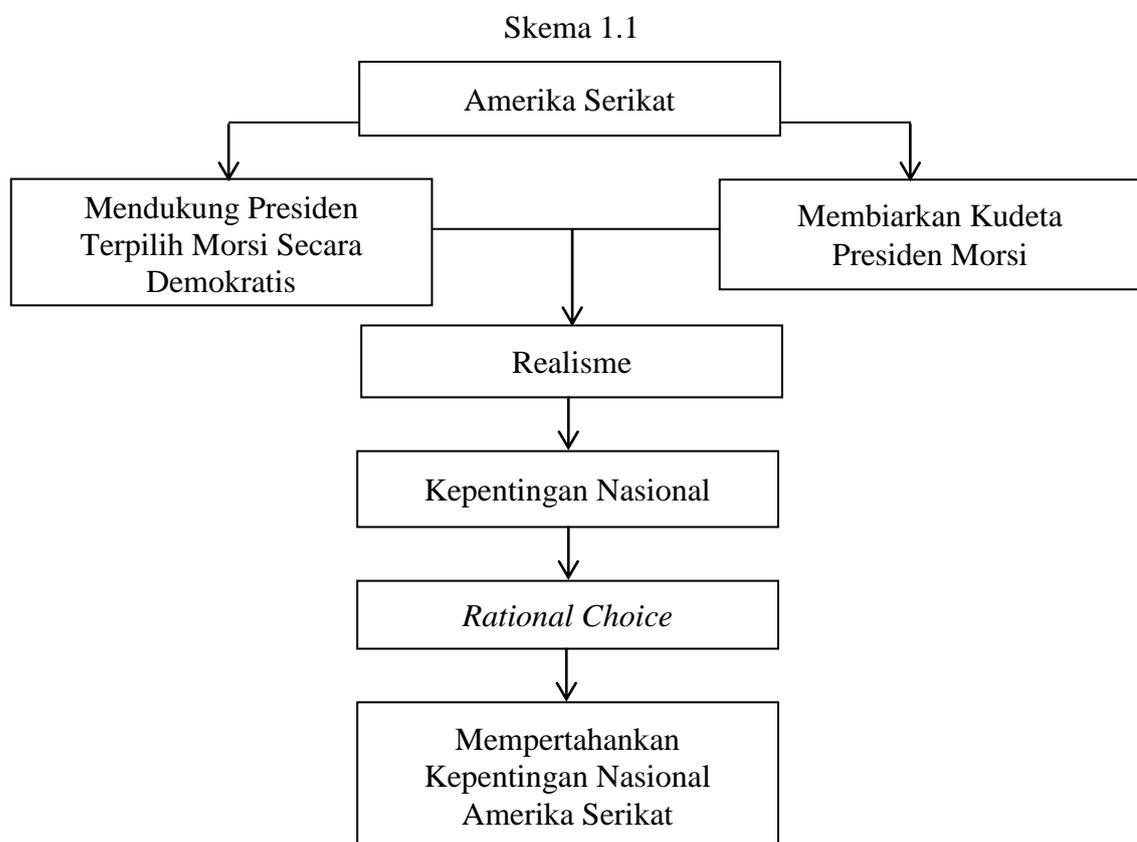
Dalam menganalisis permasalahan yang diajukan, selanjutnya penulis menggunakan teori pilihan rasional (*rational choice*). Teori pilihan rasional (*rational choice*) sendiri didefinisikan sebagai pendekatan normatif dalam menganalisis pembuatan keputusan dalam berbagai kondisi dari resiko (Tversky & Kahneman, 1986). Teori ini melihat bagaimana perilaku seorang individu sebagai subyek bersifat rasional dalam menentukan berbagai pilihan yang diambil secara terarah. Aktor akan cenderung rasional jika pilihannya dirancang untuk memperoleh hasil yang optimal dan maksimal sesuai dengan tujuannya. Pengambilan keputusan tersebut dilakukan dengan urutan berikut. Pertama adalah aktor akan mempertimbangkan tujuan kebijakan luar negeri suatu negara dan menentukan prioritas atas berbagai pilihan kebijakan yang ada. Kedua, pengambil

keputusan akan menganalisis dan mengidentifikasi berbagai pilihan yang tersedia. Pada hasil dari analisis tersebut, akan muncul berbagai keuntungan dan timbal-balik berkaitan dari pilihan yang tersedia dan akan dipertimbangkan dampak atau konsekuensi dari keputusan kebijakan yang diambil. Pertimbangan tersebut yang nantinya mendorong aktor menentukan pilihan dan tindakan yang maksimal (Slantchev, 2005).

Negara secara esensial diasumsikan sebagai aktor yang rasional (*state is essentially a rational actor*). Asumsi ini berhubungan dengan proses pembuatan keputusan politik luar negeri, yang seharusnya mencakup perumusan tujuan, pertimbangan-pertimbangan alternatif dalam pengertian ketersediaan kapabilitas negara, pertimbangan kemungkinan berbagai macam alternatif yang bisa digunakan dengan disertai pertimbangan keuntungan dan kerugian untuk masing-masing alternatif yang digunakan. Asumsi ini juga memperhitungkan bahwa unsur kemanusiaan dari para pembuat keputusan yang mungkin saja menimbulkan persepsi yang salah tentang lingkungan yang dihadapi yang bisa mengarahkan politik luar negeri tidak sesuai dengan tujuan (Smith, 2008). Sebagai aktor rasional, keadaan akan memunculkan pilihan dan pilihan tersebut ditentukan dengan mempertimbangkan konsekuensi-konsekuensi yang ada. Misalnya, suatu negara lebih memilih kebijakan A-B dan B-C, tapi kemudian setelah mempertimbangkan konsekuensi, pilihan bisa jatuh pada A-C atau mungkin sebaliknya yaitu C-A (Smith, 2008). Demikian negara bersifat rasional atas kepentingan nasionalnya, jika dihadapkan pada pilihan-pilihan kepentingan dan diharuskan memilih satu kepentingan diatas kepentingan yang lain, negara dapat

memprioritaskan satu kepentingan dan menyebabkan negara bertindak inkonsisten.

Melalui kerangka berpikir yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat digambarkan skema dari kerangka pemikiran penulis yang akan digunakan dalam menjelaskan serta menjawab rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:



## 1.6. Operasional Konsep

### 1.6.1. Definisi Konseptual

#### 1.6.1.1. Realisme

Melalui penjelasan sebelumnya terkait teori realisme, definisi realisme sendiri adalah “spektrum ide” yang mendasarkan pada empat ide utama yaitu terkait pengelompokan politik, egoisme/individualistik, keadaan anarki internasional, dan politik kekuatan (Goodin, 2010). Realisme sesuai dengan namanya bertujuan menjelaskan Hubungan Internasional secara “apa adanya” dibarengi dengan pandangan Hobbes yang ‘anarkis’, *self governed*, dipenuhi kecurigaan, maupun rasa was-was. Realisme adalah cara pandang dirinya yang menekankan pada tiga asumsi dasar pandangan dirinya dalam politik internasional, yaitu pertama adalah bahwa negara merupakan aktor tunggal dan rasional didalam dunia anarki, kedua adalah realitas hubungan internasional adalah konfliktual sebagaimana tak ada otoritas diatas negara didalam dunia yang anarki maka demikian negara satu dan yang lainnya akan tercipta rasa tidak percaya dan curiga yang menyebabkan negara harus bersikap *self-help*, ketiga adalah bahwa sistem internasional ditentukan sebagaimana kapabilitas material dari negara yaitu berupa sesuatu yang kasat mata dan dapat dihitung (*tangible power*) berupa militer, pendapatan perkapita, kemampuan nuklir, dan sebagainya. Asumsi dasar tersebut bersama sifat-sifat dari realisme yang telah dijelaskan menjadi alat analisis dari penelitian ini.

### 1.6.1.2. Kepentingan Nasional

Sebagaimana menurut Morgenthau dalam Rudy (2002), kepentingan nasional adalah sebuah kemampuan minimal dari suatu negara dalam melindungi dan mempertahankan identitas fisiknya, politiknya, dan kultur dari gangguan atau ancaman dari negara lain. Demikian definisi tersebut disesuaikan dengan permasalahan penelitian yaitu kepentingan nasional merupakan tujuan dari negara yaitu segala sesuatu yang dapat membentuk dan melindungi atau mempertahankan kendali suatu negara atas negara yang lain.

### 1.6.1.3. *Rational Choice*

Definisi pilihan rasional (*rational choice*) seperti yang dijelaskan sebelumnya menurut Tversky & Kahneman (1986) adalah pendekatan normatif dalam menganalisis pembuatan keputusan dalam berbagai kondisi dari resiko. Melalui penelitian ini, definisi tersebut dikembangkan, yaitu upaya aktor/negara dalam menganalisis dan mempertimbangkan pilihan-pilihan pengambilan/pembuatan keputusan yang didasarkan pada kondisi resiko dari tiap pilihan yang ada. Maka demikian prioritas kepentingan nasional dapat dipilih sesuai dengan pertimbangan konsekuensi.

## 1.6.2. Definisi Operasional

### 1.6.2.1. Realisme

Melalui bagaimana pokok-pokok pemikiran realisme seperti dijelaskan pada sebelumnya, penelitian ini akan membutuhkan data-data berdasarkan kerangka pemikiran misalnya dalam hal ini realisme. Maka data-data yang

dibutuhkan adalah bagaimana Amerika Serikat memposisikan dirinya dalam dunia internasional khususnya terhadap Mesir, misalnya menggunakan *power*, bertindak egois, bersifat individualistik, maupun pengutamaan kepentingan nasionalnya.

#### 1.6.2.2. Kepentingan Nasional

Sesuai bagaimana kepentingan nasional didefinisikan, penelitian ini mencoba menjawab terkait rumusan masalah yang diajukan, maka data-data yang akan dibutuhkan adalah terkait berbagai kepentingan apa yang mendasari Amerika Serikat bertindak inkonsisten dalam pendukungannya terhadap Mohamed Morsi yang nantinya berlanjut pada sifat realisme yaitu *rational choice*.

#### 1.6.2.3. *Rational Choice*

Setelah berangkat dari data-data kepentingan nasional yang dijabarkan, penelitian ini akan membutuhkan data bagaimana Amerika Serikat menjadi aktor rasional yang mempertimbangkan berbagai pilihan-pilihan dengan tujuan utama kepentingan nasionalnya di Mesir.

### **1.7. Argumen Penelitian**

Penelitian ini akan menggunakan perspektif realisme yaitu terkait dengan kepentingan nasional dan aktor rasional sebagai faktor utama inkonsistensi Amerika Serikat dalam menentukan sikapnya terhadap kudeta Morsi. Penulis berargumen bahwa Amerika Serikat memiliki kepentingan nasional yaitu berupaya mempertahankan pengaruh negaranya di Mesir sebagaimana selama puluhan tahun telah membangun relasi kepentingan di Mesir sebelum masa

Presiden Morsi, utamanya terkait keamanan regional dan kepentingan minyak. Jika demikian, Amerika Serikat mempertahankan dukungan terhadap pemerintahan Morsi yang jatuh, maka terdapat potensi Amerika Serikat kehilangan pengaruh di pemerintahan Mesir yang baru.

## **1.8. Metode Penelitian**

Penelitian akan menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai teknik pengumpulan data. Penelitian kualitatif sendiri yaitu penelitian yang dilakukan tanpa kehadiran prosedur alat-alat statistik (Ali & Yusof, 2011). Penelitian kualitatif lebih menekankan pada analisis fenomena. Penelitian kualitatif dilakukan untuk memperoleh pemahaman kondisi suatu konteks dengan fokus pada deskripsi secara rinci dan mendalam mengenai kondisi suatu konteks yang alami sesuai dengan keadaan aslinya (Nugrahani, 2014). Melalui penelitian kualitatif pula dapat disimpulkan bahwa fokus penelitian kualitatif adalah pada proses dan pemaknaan hasil dari penelitiannya (Basri, 2014). Penulis mengumpulkan sumber-sumber literasi melalui sumber otentik seperti buku, jurnal, maupun media daring. Media massa juga dapat menjadi sumber literasi.

### **1.8.1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif. Sebagaimana definisi penelitian eksplanatif sendiri adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk menerangkan dan menguji hipotesis dari berbagai variabel penelitian serta berfokus pada analisis berbagai hubungan antara variabel (Singarimbun & Effendi, 1981).

### 1.8.2. Situs Penelitian

Situs/lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh berbagai informasi terkait data yang dibutuhkan dalam hal ini juga bisa terkait lokasi yang merupakan tempat penelitian dilakukan (Muchtar, 2015). Penelitian ini akan dilakukan di Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia dimana peneliti memperoleh berbagai informasi terkait data yang dibutuhkan.

### 1.8.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang diamati sebagai sasaran penelitian (Moeliono, 1993). Subjek penelitian yang diharapkan penulis dapat menjawab rumusan masalah yang diajukan adalah umumnya aktor-aktor yang terlibat terkait topik yang diangkat. Dalam hal ini misalnya aktor negara, pejabat publik, masyarakat umum, maupun peneliti.

### 1.8.4. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data penelitian kualitatif, dimana data yang digunakan berupa kata, kalimat, skema maupun gambar. Penelitian dengan jenis data kualitatif meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2005).

### 1.8.5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder, dalam hal ini penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang mendasarkan pada informasi yang dikumpulkan dari sumber

data yang telah ada sebelumnya. Dalam hal ini misalnya terkait catatan, dokumentasi dan publikasi perusahaan/pemerintah, analisis industri oleh media, situs internet, dan seterusnya (Uma, 2006). Berdasarkan definisi tersebut maka dalam penelitian kualitatif ini sumber data yang digunakan adalah berupa teks, kata-kata tertulis, dan peristiwa yang menggambarkan situasi dalam topik penelitian ini.

#### 1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Craswell (2007:118) mengatakan bahwa langkah penting dalam proses pengumpulan data dari penelitian kualitatif adalah menemukan orang/tempat yang akan diselidiki, dan mendapatkan akses. Kemudian peneliti menentukan terkait jenis teknik akan digunakan sesuai konteks masalah yang ingin diteliti misalnya apakah berupa wawancara, observasi, atau bentuk lainnya. Pengumpulan data dari penelitian ini dilakukan dengan teknik yaitu pengamatan (observasi) yang nantinya akan dilanjutkan pada analisis dan interpretasi data.

#### 1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data adalah proses berkelanjutan dari teknik pengumpulan data yang dalam hal ini membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data yang telah dikumpulkan, lalu mengajukan pertanyaan analitis, dan menulis catatan sepanjang penelitian (Creswell, 2010). Terkait interpretasi data, penulis menggunakan metode *process-tracing* yaitu berpusat pada analisis proses terjadinya sesuatu. Metode tersebut akan menganalisis mekanisme bagaimana suatu keadaan sebab yang menghasilkan akibat (hubungan kausal).

### 1.8.8. Kualitas Data

Secara konvensional, kualitas data kualitatif adalah sampel yang tidak mewakili siapapun dengan mempertimbangan 3 prinsip utama yaitu ketepatan penggunaan metode, kredibilitas, dan relevansi (Kitto, 2008). Kualitas data dalam penelitian ini diperoleh melalui paradigma kritis yaitu memperoleh data dengan menganalisis *historical situatedness* (memperhatikan konteks latar belakang historis, sosial, budaya, ekonomi, dan politik).

### 1.9. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan terbagi dalam empat bab. Bab 1 merupakan pendahuluan yang terdiri secara berurutan dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan terakhir adalah sistematika penulisan.

Pada Bab 2, akan dijabarkan mengenai data-data yang diperoleh terkait dengan rumusan masalah yang diajukan. Bab 3 akan berisi analisis dari data dan kerangka pemikiran yang akan dikaitkan dengan metode penelitian yang dilakukan oleh penulis. Bab 4, bab terakhir menjelaskan hasil dari penelitian dan sebagai penutup atas kesimpulan penulis. Bab 4 juga memaparkan pembuktian dari penelitian terkait dengan rumusan masalah dan hasil yang didapatkan yang sekaligus dapat menjadi potensi penelitian lanjutan atas kekurangan-kekurangan yang ada.